



Lembaga Pendidikan Berulah, Polisi dan Warnet Kena Batunya

Ketika ramai-ramainya *issue sweeping* warnet, banyak orang yang ramai berpolemik. Dari berbagai polemik ini, banyak orang menyalahkan oknum polisi yang mencoba mencari kesempatan. Banyak yang menyalahkan oknum warnet yang mencoba menyogok polisi. Ada juga yang menyalahkan MS/BSA karena memanasi-manasi polisi untuk melakukan *sweeping*.

Banyak pihak yang mencoba melakukan pembenaran kegiatan pembajakan tersebut, entah dengan alasan mahalnya perangkat lunak hingga alasan historis. Sayang sekali sebagian besar hanya tetap menggunakan asumsi bahwa penggunaan perangkat lunak proprietary closed source itu adalah satu-satunya kemungkinan cara untuk menggunakan komputer. Lupa atau menganggap tidak adanya solusi alternatif, misal dengan menggunakan perangkat lunak *open source*.

Tidak heran bila akhirnya banyak pihak yang cuci tangan, saling tuding cari selamat. Polisi cuci tangan, dan mengatakan tidak memerintahkan anak buahnya di lapangan untuk melakukan *sweeping* tersebut. BSA dan MS merasa tidak pernah mendorong polisi melakukan hal itu. Dan yang paling konyol bahkan BSA mengatakan masih tutup mata dengan pembajakan di lembaga pemerintahan dan polisi.

Tapi ada juga pihak yang jadi cuci piring, atau dengan kata lain jadi repot. Pihak itu adalah AWARI dan komunitas open source. Komunitas open source bekerja sama dengan Menristek dan Menkominfo serta beberapa universitas meluncurkan distro open source untuk warnet yang diberi nama WaroengIGOS. Bahkan Universitas Gunadarma mencurahkan dana untuk membayar pengembang yang mengembangkan distro ini serta melakukan pelatihan ke warnet.

Mungkin kita perlu merenung, introspeksi, dan kontemplasi. Sebetulnya pihak manakah yang paling bersalah dalam terbiasanya masyarakat akan penggunaan perangkat lunak bajakan ini? Dan mengapa masyarakat terbiasa dengan perangkat lunak tersebut saja, dan menutup mata pada solusi alternatif. Sehingga main tabrak saja, tidak peduli lisensi dan harga sesungguhnya. Bila kita melihat pelaksanaan pendidikan TI di Indonesia, ada beberapa hal yang menjadikan hal ini terjadi.

Pertama, masih sedikit yang mengajarkan pengetahuan tentang lisensi atau HAKI secara umum. Bahkan di dalam lembaga pendidikan yang memberikan mata kuliah komputer. Bahkan yang lebih me-nyeramkan, banyak dosen TI sama sekali awam atau tidak peduli mengenai lisensi ini. Dunia pendidikan kita menjadi lupa akan tujuan pendidikan itu sendiri yang bukan saja memberikan bekal keterampilan, tetapi memberikan nilai-nilai sosial positif kepada kehidupan masyarakat luas.

Kedua, banyak perguruan tinggi menganggap bila sudah memiliki Microsoft Campus Agreement (MCA) maka persoalannya beres. Tidak peduli program *proprietary* lainnya adalah bajakan. Tidak peduli AutoCAD, SPSS, Matlab, ArcView yang digunakan para dosen dan mahasiswa adalah bajakan. Tidak peduli apakah nantinya mahasiswa setelah lulus, tetap dapat membeli perangkat lunak tersebut dengan harga normal (bukan harga mahasiswa).

Ketiga, masih sedikit lembaga pendidikan yang mengajarkan penggunaan perangkat lunak alternatif untuk menutupi kebutuhan pekerjaannya tanpa perlu membajak. Lembaga pendidikan turut serta dalam menutup mata masyarakat akan solusi alternatif. Bandingkan dengan lembaga pendidikan di Afrika seperti Namibia dan Uganda, yang walaupun pemerintahnya mendapatkan donasi dari Microsoft, tapi mereka aktif mengajarkan solusi alternatif. Mereka sadar, masyarakat tak mungkin membeli perangkat lunak dengan harga yang tinggi itu. Berbeda dengan kondisi di Indonesia.

Sering kali lembaga pendidikan beralasan melakukan pembajakan karena tidak ingin mahasiswa ketinggalan belajar teknologi informasi. Rusaknya mental (kebiasaan tidak menghargai karya orang lain), diabaikan hanya demi trampilnya anak murid menggunakan suatu jenis perangkat lunak. Bila warga yang relatif lebih terdidik saja masih buta, bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat hanya meniru apa yang dilakukan oleh orang yang dianggapnya terdidik.

Jadi, warnet hanyalah korban dari lembaga pendidikan, bukan korban polisi. Di masa depan, lembaga pendidikan haruslah menyadari hal ini. Jangan jadikan polisi dan masyarakat luas seperti warnet korban keegoisan lembaga pendidikan untuk mempelajari penggunaan perangkat lunak tertentu. ♪

Bila warga yang relatif lebih terdidik saja masih buta, bagaimana dengan masyarakat?